

Judul : Hasilkan Nikel Berkadar Rendah : Proyek Smelter Perlu Dievaluasi
Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Hasilkan Nikel Berkadar Rendah Proyek Smelter Perlu Dievaluasi

HILIRISASI nikel di dalam negeri dinilai masih jauh dari harapan. Salah satu sebabnya, produk nikel yang dihasilkan masih berupa Nickel Pig Iron (NPI), atau seringkali disebut feronikel berkadar rendah.

Diduga, investor berupaya menghindari pembayaran royalti lebih tinggi agar mineral yang diekspor ini hanya berupa nikel berkadar rendah.

"Karena *smelter* yang dibangun investor ini masih berteknologi rendah, hanya memproduksi NPI," kata anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya, kemarin.

Patijaya menduga, investor

sengaja membangun smelter berteknologi rendah ini sebagai upaya menghindari pembayaran royalti yang lebih tinggi kepada negara.

"Ketika perusahaan tersebut mengekspor dan membayar royalti, mereka cuma membayar sedikit berdasar kandungan nikel yang rendah," jelasnya.

Anggota Fraksi Golkar menegaskan, setiap kandungan mineral yang ditambang dari perut bumi pertiwi, ada harganya. Selain nikel, mineral tambang juga mengandung macam-macam seperti silika, mangan, zat besi, magnesium serta kobalt.

Sementara perusahaan sur-

vei yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor produk industri pertambangan, tidak pernah melaporkan secara eksplisit jenis produk yang diekspor.

"Itu kan semua (bahan mineral seperti nikel, silika, mangan, zat besi, magnesium, kobalt dan mineral lainnya) ada harganya. Ketika membayar royalti dengan dasar nikel yang kadarnya rendah hanya 5 persen, sementara sisanya mengandung apa itu, tidak pernah dibahas," terangnya.

Patijaya menilai, persoalan ini muncul karena Kementrian Investasi/Badan Koordi-

nasi Penanaman Modal, sebagai pemberi izin investasi, tidak merealisasikan visi nasional sebagai negara industri.

Kementerian Investasi hanya merasa gegap gempita menerima investasi, namun abai terkait pentingnya kebijakan hilirisasi yang mendatangkan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.

"Kita tidak bisa menyalahkan investor, karena mereka memang tujuannya itu. Tetapi apabila mereka dituntut dalam proposal bisnis investasinya untuk lebih mengolah sumber daya alam yang ada menjadi memiliki nilai tambah lebih, saya kira itu lebih

baik," katanya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Anggota Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah segera menutup smelter kelas I yang hanya bisa memproduksi NPI dan feronikel. Sebab, nilai tambah produk ini sangat rendah, sedangkan kandungan nikel yang digunakan lumayan besar.

"Sudah selayaknya Pemerintah melarang ekspor NPI dan feronikel. Pemerintah harus mampu memaksa perusahaan smelter nikel memproduksi produk yang memiliki nilai tambah lebih agar penghasilan negara lebih optimal," ujarnya. ■KAL